



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
Held in Madiun on July 24th 2026
e-ISSN: 2798-0103

Perlindungan Hak-Hak Dasar Kelompok Rentan Wanita dan Anak dalam Gelombang Pengungsi Lintas Negara

**M. Abyan Al Irsyad¹, Ananda Syarly Noviana¹, Thauriska Amalia¹,
Yohana Dwiyati Fun¹, Toni Bayu Samudra¹, Nizam Zakka Arrizal¹**

¹Universitas PGRI Madiun, muhammad_2306101041@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Gelombang pengungsi lintas negara akibat konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan menempatkan kelompok rentan, khususnya wanita dan anak-anak, pada posisi yang sangat terancam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak-hak dasar kelompok rentan dalam hukum internasional serta mengevaluasi kendala dalam implementasi perlindungan tersebut saat krisis pengungsi lintas batas¹. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Pengungsi 1951, Konvensi Hak Anak (CRC), serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) telah menjamin hak-hak dasar seperti keselamatan fisik, akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi. Namun, hambatan seperti kedaulatan negara, belum diratifikasinya instrumen internasional oleh negara penerima, dan terbatasnya fasilitas pengungsian menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan mekanisme perlindungan khusus berbasis gender dan perlindungan anak.

Kata Kunci: Perlindungan Kelompok Rentan; Pengungsi Lintas Negara; Hak Wanita dan Anak; HAM Internasional; Konvensi 1951.

Abstract

Cross-border refugee flows resulting from armed conflict and humanitarian crises place vulnerable groups—particularly women and children—in highly precarious situations. This study aims to analyze the forms of protection for the fundamental rights of vulnerable groups under international law and to evaluate the obstacles to implementing such protections during cross-border refugee crises. The research employs a normative legal method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials were gathered through a literature review and analyzed qualitatively. The findings indicate that the 1951 Refugee Convention, the Convention on the Rights of the Child (CRC), and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) guarantee fundamental rights such as physical safety, access to healthcare and education, and protection against exploitation. However, major challenges persist, including issues of state sovereignty, the failure of host countries to ratify relevant

¹ Untung Setyardi, 'Asas Kemanusiaan Versus Kedaulatan Negara: Dilema Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Perbatasan Indonesia', *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5.3 (2025), 861–70.

international instruments, and limited refugee facilities. Consequently, there is a need to strengthen international cooperation and protection mechanisms specifically for child protection.

Keywords: Protection of Vulnerable Groups; Cross-border Refugees; Rights of Women and Children; International Human Rights; 1951 Convention.

I. Pendahuluan

Dinamika gejolak geopolitik dan konflik bersenjata di berbagai wilayah kawasan dunia memicu peningkatan gelombang pengungsi lintas negara secara signifikan. Dalam situasi perpindahan paksa (forced displacement) tersebut, kelompok wanita dan anak-anak menjadi pihak yang paling rentan mengalami penderitaan ganda (double vulnerability). Selain kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, mereka kerap menghadapi risiko tindak kekerasan berbasis gender, perdagangan orang (human trafficking), eksploitasi seksual, hingga diskriminasi dalam mendapatkan akses bantuan dasar kemanusiaan.

Hukum HAM internasional dan Hukum Pengungsi Internasional secara eksplisit memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak dasar manusia. Instrumen hukum utama seperti Convention Relating to the Status of Refugees 1951 beserta Protocol 1967 menegaskan jaminan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi². Selain itu, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dan Convention on the Rights of the Child (CRC) memperkuat kerangka perlindungan khusus bagi wanita dan anak-anak di daerah konflik dan pengungsian.

Meskipun instrumen hukum internasional telah tersedia, implementasi di lapangan masih menemui hambatan besar. Konflik antara kedaulatan negara (state sovereignty) dan kewajiban kemanusiaan internasional acap kali membuat penanganan pengungsi wanita dan anak tidak optimal. Keterbatasan fasilitas di penampungan sementara serta minimnya integrasi layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan anak semakin memperburuk kondisi mereka³. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Rumusan masalah:

1. Bagaimana kerangka hukum internasional mengatur perlindungan hak-hak dasar kelompok rentan wanita dan anak dalam gelombang pengungsi lintas negara?
2. Apa saja kendala utama dalam implementasi penegakan hak-hak dasar pengungsi wanita dan anak di negara penerima atau transit?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

² U N General Assembly, 'Convention Relating to the Status of Refugees', *United Nations, Treaty Series*, 189.1 (1951), 137.

³ Winny Kirana Hasanah and others, *Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Pendekatan Komprehensif Untuk Perempuan Dan Anak Dengan Kondisi Rentan)* (Penerbit: Kramantara JS, 2025).

(normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum, asas hukum, serta instrumen hukum internasional yang relevan dengan topik pembahasan.

Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah konvensi-konvensi internasional (Konvensi Pengungsi 1951, CEDAW, CRC), serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami doktrin hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan.

Bahan Hukum: Menggunakan bahan hukum primer (konvensi dan peraturan internasional), bahan hukum sekunder (buku, jurnal hukum, laporan UNHCR/UNICEF), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

Teknik Analisis: Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif preskriptif untuk memberikan pemikiran kritis terkait masalah yang diteliti.

III. Pembahasan

1. Kerangka Hukum Internasional dalam Perlindungan Pengungsi Wanita dan Anak

Hukum Internasional telah menetapkan perlindungan komprehensif bagi pencari suaka dan pengungsi melalui 1951 Refugee Convention. Namun, mengingat kerentanan khusus yang dialami wanita dan anak, perlindungan tersebut diperkuat oleh instrumen HAM internasional lainnya:

Perlindungan Hak Wanita: Melalui CEDAW dan rekomendasi umum UNHCR (Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution), negara wajib memberikan perlindungan dari kekerasan seksual, menyediakan akses kesehatan reproduksi, serta menjamin keadilan dalam proses penetapan status pengungsi (Refugee Status Determination)⁴. Perlindungan Hak Anak: Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 22 secara tegas menekankan bahwa anak-anak yang memohon status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi berhak menerima perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang tepat. Prinsip Best Interests of the Child (Kepentingan Terbaik bagi Anak) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penanganan pengungsi anak, termasuk penanganan anak tanpa pendamping (unaccompanied minors).

⁴ Aviel Paelongan Dase, 'TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL MENURUT BEIJING DECLARATION= INTERNATIONAL LAW REVIEW ON THE PROTECTION OF WOMEN FROM SEXUAL VIOLENCE ACCORDING TO THE BEIJING DECLARATION' (Universitas Hasanuddin, 2022).

2. Tantangan dan Kendala Implementasi di Negara Transit dan Negara Penerima Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak dasar pengungsi wanita dan anak menghadapi pelbagai hambatan substantif dan struktural:

- Konflik Kedaulatan dan Pengetatan Batas Negara: Banyak negara memperketat keamanan perbatasan dengan alasan keamanan nasional, yang berisiko melanggar prinsip non-refoulement (larangan mengembalikan pengungsi ke wilayah berbahaya)⁵.
- Keterbatasan Fasilitas Camp Pengungsian: Banyak penampungan sementara yang tidak memadai, tidak memiliki pemisahan fasilitas sanitasi berbasis gender, minim penerangan, dan memicu tingginya risiko kejahatan/kekerasan seksual terhadap wanita dan anak⁶.
- Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Terbatas: Anak-anak pengungsi sering kehilangan hak atas pendidikan dalam jangka panjang, sementara wanita pengungsi kesulitan memperoleh layanan kesehatan mental/trauma healing dan kesehatan maternitas⁷.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan :

Perlindungan terhadap hak-hak dasar kelompok rentan wanita dan anak dalam gelombang pengungsi lintas negara telah dijamin secara normatif melalui pelbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951, CRC, dan CEDAW. Namun, implementasi penegakan hak tersebut masih terhambat oleh kebijakan internal negara penerima/transit, keterbatasan infrastruktur penampungan, serta minimnya pendekatan berbasis gender dan anak dalam manajemen pengungsian.

Saran:

1. Bagi Komunitas Internasional dan UNHCR: Diperlukan peningkatan koordinasi serta pembagian beban (burden sharing) yang lebih adil antarnegara dalam membiayai dan menyediakan fasilitas ramah wanita dan anak di kamp pengungsian.
2. Bagi Pemerintah Negara Transit/Penerima: Diharapkan dapat menyusun kebijakan nasional penanganan pengungsi yang responsif gender dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi

⁵ Dani Achnisundani and others, 'Paradoks Pengungsi: Antara Perlindungan HAM Dan Kedaulatan Nasional Dalam Krisis Kemanusiaan', *Journal of Law and Nation*, 4.2 (2025), 371–93.

⁶ Laila Rizki Amaliah, 'PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELINDUNGI ANAK PENGUNGSI DARI KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA (Studi Pada LBH Apik, SUAKA Indonesia Dan Forum Pengada Layanan)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁷ Ayu Nabilla Azaara Meri Neherta Ira and Mulya Sari Penerbit Adab, *Optimalkan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dasar Saat Bencana* (Penerbit Adab, 2023).

anak, serta membuka akses pendidikan dasar dan kesehatan reproduksi secara inklusif.

V. Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. atas arahan dan bimbingannya, serta kepada Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun atas dukungan fasilitas akademiknya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan yang telah memberikan semangat dan bantuan selama proses penelitian ini

Daftar Pustaka

- Achnisundani, Dani, Burhan Fajri Arfian, Tarsisius Susilo, and Wahyu Tunggal Wiratama, 'Paradoks Pengungsi: Antara Perlindungan HAM Dan Kedaulatan Nasional Dalam Krisis Kemanusiaan', *Journal of Law and Nation*, 4 (2025), 371–93
- Amaliah, Laila Rizki, 'PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELINDUNGI ANAK PENGUNGI DARI KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA (Studi Pada LBH Apik, SUAKA Indonesia Dan Forum Pengada Layanan)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Assembly, U N General, 'Convention Relating to the Status of Refugees', *United Nations, Treaty Series*, 189 (1951), 137
- Dase, Aviel Paelongan, 'TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL MENURUT BEIJING DECLARATION= INTERNATIONAL LAW REVIEW ON THE PROTECTION OF WOMEN FROM SEXUAL VIOLENCE ACCORDING TO THE BEIJING DECLARATION' (Universitas Hasanuddin, 2022)
- Hasanah, Winny Kirana, Rizqie Putri Novembriani, Alifia Candra Puriastuti, and Nina Rini Suprobo, *Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Pendekatan Komprehensif Untuk Perempuan Dan Anak Dengan Kondisi Rentan)* (Penerbit: Kramantara JS, 2025)
- Ira, Ayu Nabilla Azaara Meri Neherta, and Mulya Sari Penerbit Adab, *Optimalkan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dasar Saat Bencana* (Penerbit Adab, 2023)
- Setyardi, Untung, 'Asas Kemanusiaan Versus Kedaulatan Negara: Dilema Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Perbatasan Indonesia', *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5 (2025), 861–70